

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL KARTU KESEJAHTERAAN KELUARGA (KKS) TERHADAP KETEPATAN SASARAN PENERIMA BANTUAN: STUDI DI KABUPATEN MAJALENGKA

Hairul Selamattul Yasir¹, Dr. H Faizal Pikri, S.S.,M.Ag²

Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia.

Keywords:
*Policy
 Implementation
 Social
 Welfare Card (KKS)
 Targeting Accuracy*

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the Family Welfare Card (KKS) Social Assistance Program policy regarding the accuracy of targeting aid recipients in Kadipaten Village, Majalengka Regency. The study used a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the KKS program has not been optimal because there are still recipients who do not meet the criteria, while eligible communities have not been registered. Inaccurate targeting is influenced by the lack of data updates, weak coordination between implementers, and minimal supervision in the aid recipient verification process. In addition, limited human resources also hamper the effectiveness of program implementation. Therefore, data validation and better coordination are needed to ensure the distribution of social assistance is on target*

Kata Kunci:
*Kebijakan
 Implementasi
 Bantuan Sosial
 Kartu Kesejahteraan
 Sosial (KKS)
 Ketetapan*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Bantuan Sosial Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) terkait akurasi penargetan penerima bantuan di Desa Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KKS belum optimal karena masih ada penerima yang tidak memenuhi kriteria, sementara masyarakat yang memenuhi syarat belum terdaftar. Penargetan yang tidak akurat dipengaruhi oleh kurangnya pembaruan data, koordinasi yang lemah antar pelaksana, dan pengawasan minimal dalam proses verifikasi penerima bantuan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menghambat efektivitas implementasi program. Oleh karena itu, diperlukan validasi data dan koordinasi yang lebih baik untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.*

Pendahuluan

Bagian Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga miskin dan rentan.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Program Bantuan Sosial melalui Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS), yang digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial secara non-tunai kepada keluarga penerima manfaat. Program ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan, mengurangi potensi penyimpangan, serta memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023).

Ketepatan sasaran penerima bantuan merupakan aspek yang sangat penting dalam implementasi program bantuan sosial. Ketidaktepatan sasaran dapat menyebabkan terjadinya kesalahan inklusi (*inclusion error*), yaitu bantuan diterima oleh masyarakat yang tidak memenuhi kriteria, maupun kesalahan eksklusi (*exclusion error*), yaitu masyarakat yang layak menerima bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat (World Bank, 2022). Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas program dan menimbulkan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan bantuan sosial memerlukan sistem pendataan yang akurat, koordinasi antarlembaga yang baik, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Dalam kajian kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan keberhasilan suatu program. Menurut George C. Edwards III (1980), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam mengatur perubahan perilaku, serta faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Teori-teori tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh proses pelaksanaannya di lapangan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Indonesia. Penelitian oleh Riant Nugroho (2021) menunjukkan bahwa kualitas data penerima manfaat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi ketepatan sasaran bantuan sosial. Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa keterbatasan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, rendahnya pembaruan data masyarakat miskin, serta minimnya partisipasi masyarakat

dalam proses verifikasi data sering kali menyebabkan ketidaktepatan penyaluran bantuan (Suharto, 2020).

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Program KKS sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial pemerintah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai persoalan, seperti adanya penerima bantuan yang dianggap tidak memenuhi kriteria, masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar, serta ketidaksesuaian antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan data yang tersedia. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi di lapangan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan sosial melalui Program KKS.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Program Bantuan Sosial Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) dalam mewujudkan ketepatan sasaran penerima bantuan di Kabupaten Majalengka serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Bantuan Sosial Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan di Kabupaten Majalengka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program serta mengevaluasi sejauh mana program tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana implementasi kebijakan Program Bantuan Sosial Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) di Kabupaten Majalengka; (2) sejauh mana ketepatan sasaran penerima bantuan sosial melalui Program KKS telah tercapai; (3) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi Program KKS; dan (4) bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial di Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang administrasi publik, khususnya

mengenai implementasi kebijakan sosial dan efektivitas program bantuan sosial. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, instansi pelaksana, serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas pendataan, penyaluran, dan pengawasan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Tinjauan Literatur

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut George C. Edwards III (1980), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan Program Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS).

Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran merupakan tingkat kesesuaian antara penerima bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program bantuan sosial yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meminimalkan kesalahan inklusi maupun eksklusi dalam penyaluran bantuan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023).

Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Penelitian oleh Riant Nugroho (2021) menunjukkan bahwa kualitas data penerima manfaat berpengaruh terhadap keberhasilan program bantuan sosial. Penelitian lain oleh Edi Suharto (2020) menemukan bahwa koordinasi antarinstansi dan validitas data menjadi faktor penting dalam ketepatan sasaran bantuan sosial. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kemampuan pelaksana kebijakan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi bantuan sosial, sebagian besar penelitian berfokus pada efektivitas program secara umum dan kualitas

data penerima manfaat. Penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi Program Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan di Kabupaten Majalengka masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji implementasi Program KKS serta faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran penerima bantuan di Kabupaten Majalengka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Bantuan Sosial Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan di Kabupaten Majalengka. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas aparatur pemerintah, pendamping sosial, perangkat desa, dan masyarakat penerima manfaat yang dianggap memiliki informasi terkait pelaksanaan program (Sugiyono, 2022).

Hasil Penelitian

Implementasi Program KKS di Kabupaten Majalengka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) di Kabupaten Majalengka telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Penyaluran bantuan dilakukan melalui lembaga penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sosialisasi program telah dilakukan kepada masyarakat melalui pemerintah desa dan pendamping sosial. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan informasi yang diterima sebagian masyarakat terkait mekanisme pembaruan data penerima manfaat.

Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerima bantuan telah memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa kasus ketidaktepatan sasaran, seperti masyarakat yang kondisinya

sudah membaik tetapi masih menerima bantuan, serta masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum terdaftar dalam data penerima manfaat.

Tabel 1. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan KKS di Kabupaten Majalengka

No	Kategori temuan	Hasil
1	Penerima sesuai kriteria	Mayoritas
2	Penerima tidak sesuai kriteria	Ditemukan
3	Masyarakat layak, namun belum menerima bantuan	Ditemukan
4	Pembaruan data penerima	Belum optimal

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KKS di Kabupaten Majalengka telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, namun masih menghadapi kendala dalam aspek ketepatan sasaran penerima bantuan. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, faktor komunikasi terlihat dari proses sosialisasi program kepada masyarakat, sedangkan faktor sumber daya tercermin dari peran pendamping sosial dalam mendukung pelaksanaan program.

Temuan mengenai masih adanya penerima yang tidak sesuai kriteria menunjukkan bahwa validitas data penerima manfaat masih menjadi tantangan utama. Hasil ini mendukung penelitian Riant Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa kualitas data merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan terjadinya *inclusion error* maupun *exclusion error* sehingga tujuan program untuk membantu masyarakat miskin belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, ditemukan bahwa pembaruan data penerima manfaat belum berjalan secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Edi Suharto (2020) yang menjelaskan bahwa permasalahan pendataan sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pendamping sosial dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program KKS di Kabupaten Majalengka telah memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat miskin, namun ketepatan sasaran penerima bantuan masih perlu ditingkatkan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pembaruan data secara berkala, peningkatan pengawasan, serta penguatan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Bantuan Sosial Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) di Kabupaten Majalengka telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah dan didukung oleh koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pendamping sosial dalam proses penyaluran bantuan. Namun, ketepatan sasaran penerima bantuan masih belum optimal karena masih ditemukan penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat serta masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar dalam data penerima. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan dan validasi data penerima bantuan masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, keberhasilan Program KKS dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan keempat aspek tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendataan, pembaruan data secara berkala, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pengawasan yang lebih optimal agar ketepatan sasaran penerima bantuan dapat ditingkatkan dan tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai secara lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
- Tresnadipangga, B., Fuad, F., & Suartini, S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213-226.
- Tresnadipangga, B., Fuad, F., & Suartini, S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213-226.
- Nugroho, R. (2021). Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan. Elex Media Komputindo.
- Pali, K. A. K. (2014). Metodologi penelitian. Repository. Radenfatah. Ac. IdVW
SujarweniYogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Suharto, E. (2015). Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial.
- Satoh, Y. O., Tegelskaer, G., Ricaldi, F., Behr, D. C., & Morri, A. SOCIAL PROTECTION & JOBS| POLICY & TECHNICAL NOTE JUNE 2024| No. 41.